



::PENANGGULANGAN KEMISKINAN

TKPK Mulai Gandeng CSR

YOGYAKARTA - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Yogyakarta menggandeng swasta untuk mempercepat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Tahun ini, enam wilayah kelurahan telah dipilih menjadi pilot project untuk program yang akan memanfaatkan *corporate social responsibility* (CSR) dari swasta tersebut.

Koordinator Sekretariat TKPK Kota Yogyakarta Pande Made Kertanegara mengatakan, pencairan program CSR tersebut menjadi tindak lanjut dari realisasi penyediaan sekretariat resmi TKPK. "Dengan sudah adanya sekretariat, kegiatan menjadi lebih mudah dilakukan. Untuk awal, kami agendakan menggandeng CSR," ucapnya.

Dari upaya *gathering* mengundang sejumlah instansi, baik swasta maupun BUMN dan BUMD, respons yang diterima

cukup positif. Setidaknya lebih dari separuh setiap jenis institusi yang diundang, hadir memenuhi acara sosialisasi membangun komitmen bersama untuk menangani kemiskinan.

Jika agenda yang dilakukan lancar, diharapkan penetrasi yang dilakukan bisa menurunkan angka kemiskinan hingga 2%. Jika saat ini jumlah penduduk miskin ada 9,30% atau sekitar 37.600 jiwa, pada 2016 jumlahnya hanya tersisa 7,30%.

Target penurunan tersebut diklaim sangat jauh jika dibandingkan dengan penurunan rata-rata jumlah warga miskin di Yogyakarta yang hanya 0,30% per tahun. "Tahun 2016 harapannya jumlah penduduk miskin tinggal 7,30% saja. Meski hingga kini diyakini jika persentasenya tinggal satu digit, penurunannya cukup sulit, butuh kerja keras dan ko-

mitmen," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono yang menjadi Koordinator TKPK Kota Yogyakarta mengatakan, upaya menggandeng pihak ketiga tersebut harus dilakukan secara profesional. Hal itu dikarenakan, apa yang disalurkan merupakan bentuk kepercayaan dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan di masyarakat.

Pembentukan sekretariat dan program CSR yang dilakukan saat ini disebutkannya sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan program oleh TKPK sejak 2006. "Ini bagian dari penetrasi untuk percepatan," katanya.

Mengenai kebutuhan anggaran dari CSR, Imam Priyono mengaku belum bisa memastikan. Hal tersebut membutuhkan riset mendalam agar data yang diperoleh cukup valid.

● **maha deva**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005